



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.539139/2023**



DS:6624-0037-0656-8050

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 46.300.000 (EMPAT PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 46.300.000
Rp. 46.300.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 46.300.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 46.300.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6624-0037-0656-8050

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			46.300.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			46.300.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	Jumlah Aparatur Pengadilan Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
		7. 02	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		8. 03	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau disempurnakan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	12.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	12.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	32.900.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	32.900.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	1.400.000
Rincian Output	:	01	QCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	1,00	Perkara	1.400.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6624-0037-0656-8050

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	-	46.300	-	-	-	46.300		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	46.300	-	-	-	46.300		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	46.300	-	-	-	46.300		
1059.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	12.000	-	-	-	12.000	25 . 51	
01	RM	-	12.000	-	-	-	12.000	063	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	32.900	-	-	-	32.900	25 . 51	
01	RM	-	32.900	-	-	-	32.900	063	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	1.400	-	-	-	1.400	25 . 51	
01	RM	-	1.400	-	-	-	1.400	063	
JUMLAH		-	46.300	-	-	-	46.300		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6624-0037-0656-8050

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	2.400	3.425	3.650	3.650	4.675	4.900	5.925	6.300	2.650	3.675	5.050	46.300
		BELANJA BARANG	0	2.400	3.425	3.650	3.650	4.675	4.900	5.925	6.300	2.650	3.675	5.050	46.300
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	2.400	3.425	3.650	3.650	4.675	4.900	5.925	6.300	2.650	3.675	5.050	46.300
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.400	3.425	3.650	3.650	4.675	4.900	5.925	6.300	2.650	3.675	5.050	46.300
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.775	21.025
		- PNB (425232)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	125	1.390
		- PNB (425233)	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	365	4.270
		- PNB (425239)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.285	15.365

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2023
IV A. B L O K I R**



DS:6624-0037-0656-8050

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

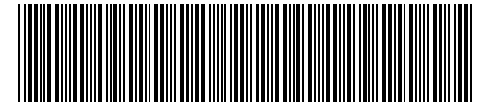
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:6624-0037-0656-8050

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002